

STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PADA DESA CIBUNGUR KABUPATEN PURWAKARTA

Abdal¹⁾, Adilla Sabrina²⁾, Afani Akhira³⁾, Agung Prayoga⁴⁾, Bima Adityo⁵⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1),2),3),4),5)}

Email: *abdal@uinsgd.ac.id*¹⁾, *adillasabrina51@gmail.com*²⁾, *afaniakhira23@gmail.com*³⁾, *yayogaa29@gmail.com*⁴⁾, *bimaadityoo@gmail.com*⁵⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan Ekologi Administrasi Publik melalui sistem pemerintahan di Desa Cibungur Purwakarta. Masalah pada penelitian ini adalah pemerintah Desa Cibungur tidak melakukan strategi-strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakatnya serta dalam tradisi masyarakatnya kurang begitu antusias saat ada tradisi adat yang diadakan di daerah setempat, dikarenakan desa cibungur sendiri sudah dapat dibilang sebagai desa yang modern. Metode Penelitian yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini adalah strategi-strategi yang dikemukakan secara teoritis khususnya dalam sebuah sistem pemda melalui beberapa aspek seperti keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan atau ketertiban, Sebagian telah teraplikasikan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa aspek yang belum ter-terapkan dengan baik dikarenakan beberapa faktor diluar kendali.

Kata Kunci : *Strategi, Ekologi, Pemerintahan Desa*

Abstract

This study aims to determine the strategy of developing Public Administration Ecology through the government system in Cibungur Village, Purwakarta. The problem in this study is that the Cibungur Village government does not carry out strategies in the economic development of its people and in the traditions of its people are less enthusiastic when there are traditional traditions held in the local area, because Cibungur village itself can be considered a modern village. The research method used is a qualitative technique using descriptive methods. Data collection techniques used in this research are interview, observation, and literature study. While the data analysis technique is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results and Discussion in this study are the strategies put forward theoretically, especially in a local government system through several aspects such as social, economic, cultural, political and security or order conditions. -Apply well due to several factors beyond control.

Keywords: *Strategy, Ecology, Village Government.*

A. PENDAHULUAN

Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis, John (1988) mendefinisikan strategi adalah sebuah pola yang mendasar dari sasaran dan direncanakan, penyebaran sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan. (Hasan, 2010)

Di Desa Cibungur sendiri strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah dengan melakukan berbagai program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Seperti setiap bulannya ada bantuan khusus dari pemerintah desa yang disalurkan untuk masyarakat yang masuk kedalam kriteria anak yatim/piatu, guru ngaji, janda, jompo, dan lansia. Adapun program lain yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibungur ialah dengan mengadakan program ReDor (Relawan Donor Darah), dimana bagi warga Desa Cibungur yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi pihak desa untuk nantinya disalurkan ke PMI, selain itu dari program ini dapat membantu warga Desa Cibungur yang memungkinkan kedepannya ada warga yang membutuhkan Donor Darah. Selain itu, dalam bentuk prasarana pemerintah Desa Cibungur menyediakan Ambulance bagi puskesmas yang dapat dipakai kapanpun oleh warga yang membutuhkan untuk membantu warga yang mengalami keadaan darurat dan perlu mendapatkan penanganan medis, disini pemerintah Desa Cibungur siap 24 jam dalam jasa antar pasien dengan disediakan nya Ambulance. Masyarakat Desa Cibungur pun mengakui secara positif adanya program-program tersebut, dan dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwasannya pemerintah Desa Cibungur telah berusaha dalam menciptakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Desa Cibungur. Dengan usaha pemerintah dan respon masyarakat hal tersebut sudah dapat dikatakan pemerintah Desa Cibungur telah melaksanakan tugas sebagai pemerintah dalam meningkatkan kehidupan sosial melalui sistem pemerintahannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendetail terkait bagaimana strategi pengembangan ekologi administrasi di desa Cibungur Purwakarta dengan melihat bagaimana strategi dari tugas pemerintahan yang mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ketertiban masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Ekologi Administrasi Publik

Secara etimologi, ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua akar kata, yaitu oikos berarti rumah, rumah tangga atau tempat tinggal, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk. Menurut Sitanggang (1997) mendefinisikan “ekologi” sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dan faktor-faktornya, hubungan antar faktor lingkungan sendiri, dan hubungan antar unsur suatu faktor dengan selamanya, serta hubungan dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Komarudin (1983) memandang bahwa ekologi adalah suatu kajian yang berhubungan dengan inter-relasi antara organisme dan lingkungan. Dasar empirisnya tertelak dalam hasil penelitian bahwa organisme-organisme yang hidup ini bervariasi menurut lingkungan. (Anggara, (2018).

Definisi Administrasi Publik menurut Dwiyanto (2009) dalam buku “Perbandingan Administrasi Publik” mengemukakan definisi administrasi yang paling sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti publik adalah lawan dari kata privat atau pribadi.

Sedangkan menurut Beddy (2017) dalam buku “Dasar-Dasar Administrasi Publik”, administrasi publik adalah suatu keseluruhan dari proses kerja sama secara rasional yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintahan di mana sumber daya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan dalam rangka pelaksanaan suatu kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal tujuan negara dan penyelenggaraan berbagai kebutuhan publik.

Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Ekologi Administrasi Publik adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu dimana segala sesuatu kegiatan tersebut berkaitan dengan lingkungan yang ditentukan oleh faktor alam, sosial, dan sebagainya.

Strategi

Menurut Tjiptono (2006) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Michael Porter (1996) menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). (Rachmat, 2014)

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah perspektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi. Berdasarkan beberapa definisi para ahli diatas, dapat disimpulkan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Strategi dalam sebuah organisasi pemerintahan sangatlah dibutuhkan untuk pencapaian visi dan misi yang sudah diterapkan oleh pemerintah, maupun untuk pencapaian sasaran atau tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang.

Pengembangan Melalui Sistem

Dalam buku Sahya (2018) yang berjudul “Ekologi Administrasi” dalam pengembangan ekologi administrasi publik, ada tiga strategi pengembangan, yaitu pengembangan melalui sistem, pengembangan melalui asas dan pengembangan melalui model. Dalam fokus penelitian ini mengambil salah satu strategi pengembangan ekologi administrasi publik yakni melalui sistem. Pengembangan melalui sistem ini menurut Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan an tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Pemerintahan berarti upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan kewenangan dalam bentuk penataan, pengaturan, pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat, penduduk dan seluruh rakyat.

Tugas pemerintah adalah mencapai tujuan negara merupakan wujud komitmen bangsa dan tertuang, dalam konstitusi negara. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: (a) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) Memajukan kesejahteraan umum; (c) Mencerdaskan

kehidupan masyarakat; dan (d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas pemerintahan tersebut yang seluruhnya masuk kedalam semua aspek yang perlu dikembangkan yakni dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. (Anggara, (2018)

a. Kehidupan Sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah ditugaskan untuk melakukan berbagai upaya memperbaikinya dengan berbagai program. Program tersebut harus berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti yang dianjurkan pemerintah sendiri yakni di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Program yang dikembangkan haruslah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

b. Ekonomi. Lincolin Arsyad (2000) dalam penelitian SA. Farisy (2020) dalam strategi pembangunan ekonomi daerah salah satunya ialah dalam pengembangan dunia usaha dan pengembangan sumber daya manusia. Penciptaan iklim yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha, selain itu harus tersedia pusat konsultasi dimana usaha kecil pun perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja, dan dalam pengembangan sumber daya manusia pemerintah daerah setidaknya harus memiliki sebuah program dimana hal tersebut merupakan sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan melalui peningkatan keterampilan SDM. Maka dari itu, akan terciptanya strategi seperti ekonomi kreatif baik dalam dunia kuliner, kerajinan tangan, dan lain sebagainya dimana hal tersebut akan menjadi kelebihan SDM (skill) yang dapat mereka punya untuk menjalankan sebuah usaha dan secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi daerah.

c. Budaya. Menurut Bayu (2019) dalam penelitiannya terhadap peran pemerintah daerah menjadi fasilitator berdasarkan bentuk pelestarian budaya lokal yang perlu dilakukan ialah merawat, melindungi dan mengembangkan sebuah nilai baik yang memang sudah menjadi kebiasaan lama di daerah tersebut. Dengan melaksanakan sebuah program yang berkaitan dengan budaya tersebut, sehingga ketika pemerintah dan masyarakat di daerah secara bersamaan melakukan sebuah kegiatan yang bernilai baik dan menjadi kebiasaan merupakan salah satu bentuk dalam merawat, melindungi dan mengembangkan budaya daerah. Dimana hal tersebut bisa saja akan menjadi sebuah kelebihan yaitu budaya yang ada secara turun temurun.

d. Politik. Menurut Juan dan Alfred, demokrasi didefinisikan sebagai persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintah. Pada gilirannya, demokrasi menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah. (Muslim & Didah, 2013). Segala kebijakan yang ditawarkan pemerintah tidak boleh mencekik rakyat, mengingat tujuan berdemokrasi adalah memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam sistem politik, pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat, diawasi rakyat dan bekerja untuk rakyat. Dan ketika momentum pemilu tiba pemerintah daerah haruslah melakukan beberapa batasan kepada masyarakat untuk tidak melakukan golput, dan perilaku tidak baik lainnya yang mungkin saja dilakukan oleh calon dalam mendapatkan suara.

e. Keamanan dan Ketertiban. Menurut Ambri (2016) dalam penelitiannya, keamanan dan ketertiban ini termasuk kepada peran pemerintah daerah dalam bidang kemasyarakatan dimana pemerintah daerah harus dapat membina masyarakat dalam menjunjung tinggi kemandirian, ketertiban dan ketentraman wilayah. Selain itu hal ini juga akan memunculkan

kerukunan antar warga masyarakat daerah agar hal tersebut dapat terciptanya rasa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di daerah tersebut.

C.METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller (2002) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011), penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok

Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir dalam Andi Prastowo (2011, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Lalu, Nana Syaodih Sukmadinata (2011) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Menurut Kartini Kartono (1986) adalah “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik”. Menurut Dexter dalam (Lincoln dan Guba, 1985) wawancara adalah “percakapan yang bertujuan mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden”. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai seorang informan yang memiliki jabatan/status yang ada di Desa Cibungur, Purwakarta yaitu sebagai pegawai desa dan masyarakat sekitar desa tersebut.

D.HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Ekologi Administrasi melalui Sistem Pemerintahan Desa

Menurut Taliziduhu Ndraha menyatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan an tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Pemerintahan berarti upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa penerapan kewenangan dalam bentuk penataan, pengaturan, pengamanan dan perlindungan terhadap masyarakat, penduduk dan seluruh rakyat. Tugas pemerintahan tersebut yang seluruhnya masuk kedalam semua aspek yang perlu dikembangkan yakni dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. (Anggara, 2018)

Untuk mengetahui strategi pengembangan ekologi administrasi di Desa Cibungur maka peneliti melakukan penelitian melalui sistem pemerintahan desa tersebut dengan

mengacu kepada Teori Taliziduhu Ndraha dengan melihat bagaimana strategi dari tugas pemerintahan yang mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan ketertiban masyarakat.

a. Kehidupan Sosial

Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa, tugas pemerintah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya Memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu strategi meningkatkan kehidupan sosial masyarakat haruslah berdasarkan tujuan yang dapat memajukan kesejahteraan umum.

Di Desa Cibungur sendiri strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa ialah dengan melakukan berbagai program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Seperti setiap bulannya ada bantuan khusus dari pemerintah desa yang disalurkan untuk masyarakat yang masuk kedalam kriteria anak yatim/piatu, guru ngaji, janda, jompo, dan lansia. Adapun program lain yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibungur ialah dengan mengadakan program ReDor (Relawan Donor Darah), dimana bagi warga Desa Cibungur yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi pihak desa untuk nantinya disalurkan ke PMI, selain itu dari program ini dapat membantu warga Desa Cibungur yang memungkinkan kedepannya ada warga yang membutuhkan Donor Darah. Selain itu, dalam bentuk prasarana pemerintah Desa Cibungur menyediakan Ambulance bagi puskesmas yang dapat dipakai kapanpun oleh warga yang membutuhkan untuk membantu warga yang mengalami keadaan darurat dan perlu mendapatkan penanganan medis, disini pemerintah Desa Cibungur siap 24 jam dalam jasa antar pasien dengan disediakan nya Ambulance. Masyarakat Desa Cibungur pun mengakui secara positif adanya program-program tersebut, dan dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwasannya pemerintah Desa Cibungur telah berusaha dalam menciptakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Desa Cibungur. Dengan usaha pemerintah dan respon masyarakat hal tersebut sudah dapat dikatakan pemerintah Desa Cibungur telah melaksanakan tugas sebagai pemerintah dalam meningkatkan kehidupan sosial melalui sistem pemerintahannya.

b. Ekonomi

Dalam penelitian SA. Farisy (2020) dalam strategi pembangunan ekonomi daerah salah satunya ialah dalam pengembangan dunia usaha dan pengembangan sumber daya manusia. Penciptaan iklim yang baik bagi dunia usaha melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha, selain itu harus tersedia pusat konsultasi dimana usaha kecil pun perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja, dan dalam pengembangan sumber daya manusia pemerintah daerah setidaknya harus memiliki sebuah program dimana hal tersebut merupakan sistem pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan melalui peningkatan keterampilan SDM.

Di Desa Cibungur sendiri sayangnya pemerintah desa tidak menciptakan program yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah. Menurut pemerintah desa hal tersebut tidak dilakukan karena sangat sedikit warga yang menjalankan usaha. Dan masyarakat sendiri mengakui dengan sadar bahwasannya hal tersebut memang tidak ada pelaksanaan program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi warga. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah Desa Cibungur tidak melakukan strategi-strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakatnya. Jika mengacu kepada penelitian SA Farisy (2020) tentang strategi pembangunan ekonomi daerah, seharusnya pemerintah Desa Cibungur harus

dapat melaksanakan salah satu atau lebih strategi tersebut dalam mengupayakan kesejahteraan ekonomi warganya.

c. Budaya

Menurut Bayu (2019) dalam penelitiannya terhadap peran pemerintah daerah yang menjadi fasilitator berdasarkan bentuk pelestarian budaya lokal yang perlu dilakukan ialah merawat, melindungi dan mengembangkan sebuah nilai baik yang memang sudah menjadi kebiasaan lama di daerah tersebut. Dengan melaksanakan sebuah program yang berkaitan dengan budaya tersebut, sehingga ketika pemerintah dan masyarakat di daerah secara bersamaan melakukan sebuah kegiatan yang bernilai baik dan menjadi kebiasaan merupakan salah satu bentuk dalam merawat, melindungi dan mengembangkan budaya daerah.

Jika di lihat, masyarakat di Desa Cibungur cukup berperan aktif dalam melaksanakan pelestarian budaya lokal dalam hal kebersihan lingkungan. Dilihat dengan adanya program BUJUMSIHAT (Rabu-Jumat Bersih dan Sehat) yang diadakan tiap minggu nya, masyarakat begitu antusias bekerjasama dan bergotongroyong untuk melaksanakan program tersebut. Bahkan di desa cibungur sendiri seperti memiliki suatu kewajiban setiap rumah wajib memiliki minimal satu alat kebersihan untuk melaksanakan program tersebut, baik berupa cangkul, sekop, arit, dsb.

Namun demikian sedikit disayangkan, dalam hal tradisi masyarakat cibungur kurang begitu antusias saat ada tradisi adat yang diadakan di daerah setempat, dikarenakan lokasi desa cibungur yang berada didekat dengan jalan protokol di purwakarta, menjadikan desa cibungur sendiri sudah cukup beranjak menuju desa yang modern. Meskipun tidak semua masyarakat menghilangkan tradisi tersebut. Masih ada pula beberapa orang atau sesepuh setempat yang masih melestarikan dan ikut andil dalam tradisi yang ada disana, namun hanya sebagian kecil dari populasi masyarakat cibungur.

d. Politik

Menurut Juan dan Alfred (2005) demokrasi didefinisikan sebagai persaingan terbuka untuk mendapatkan hak menguasai pemerintah. Pada gilirannya, demokrasi menuntut diselenggarakannya pemilu yang bebas dan bersifat kompetitif, yang hasilnya dapat menentukan orang-orang yang memerintah (Muslim & Didah, 2013). Dalam sistem politik, pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat, diawasi rakyat dan bekerja untuk rakyat. Dan ketika momentum pemilu tiba pemerintah daerah haruslah melakukan beberapa batasan kepada masyarakat untuk tidak melakukan golput, dan perilaku tidak baik lainnya yang mungkin saja dilakukan oleh calon dalam mendapatkan suara.

Di desa Cibungur sendiri, kesadaran masyarakat terkait politik masih cukup baik. Dibuktikan dengan masih antusias nya masyarakat setempat ketika pesta politik tiba. Sebagian dari mereka begitu antusias bahkan bukan hanya sebagai pemberi suara, melainkan menjadi panitia pemilu untuk mensukseskan acara pemilu itu sendiri. Namun demikian perjalanan politik di desa cibungur pun tidak semulus kain sutera. Masih ada beberapa masyarakat yang tidak ingin memberikan hak suaranya (golput) disaat pilkada atau pemilu dilaksanakan. Dengan alasan yang tidak diketahui pasti mereka enggan dapat ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Namun itupun juga hanya skala minoritas, atau hanya beberapa orang saja. Selebihnya masyarakat taat dan ikut menyukseskan pesta demokrasi di daerah tersebut dengan memberikan hak suaranya.

e. Keamanan dan Ketertiban

Menurut Ambri (2016) dalam penelitiannya, keamanan dan ketertiban ini termasuk kepada peran pemerintah daerah dalam bidang kemasyarakatan dimana pemerintah daerah

harus dapat membina masyarakat dalam menjunjung tinggi kemandirian, ketertiban dan ketentraman wilayah. Selain itu hal ini juga akan memunculkan kerukunan antar warga masyarakat daerah agar hal tersebut dapat terciptanya rasa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di daerah tersebut.

Jika dilihat dari situasi dan kondisi di desa Cibungur secara garis besar desa tersebut dapat dikatakan aman. Program yang diusung desa setempat masih sama seperti desa-desa kebanyakan lainnya, yaitu dengan menerapkan program SISKAMLING (Sistem Keamanan Keliling) yang dilaksanakan setiap malam secara bergantian oleh warga setempat. Dalam program ini juga aparat desa mewajibkan adanya minimal 1 pos ronda di setiap blok yang ada di desa Cibungur, tidak lain hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan desa Cibungur itu sendiri.

Namun dalam hal ketertiban, masyarakat desa Cibungur masih belum dikatakan tertib. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang dapat dikatakan dalam hal ini. (1) dalam hal piket atau jadwal siskamling masih ada saja masyarakat yang mangkir dari jadwalnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada aparat setempat (2) lalu selanjutnya dalam hal penerapan protokol kesehatan di situasus pandemi seperti saat ini. Masih banyak orang yang acuh terhadap himbauan untuk menggunakan masker, namun demikian petugas dari gugus setempat selalu mengingatkan dan mewanti-wanti untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. (3) lalu yang terakhir terkait masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19, masih ada beberapa masyarakat yang keluyuran disaat masa isolasi mandiri. Tentu ini menjadi hal yang sangat berbahaya karena bisa menyebarkan kluster baru di daerah desa Cibungur itu sendiri.

E.SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, strategi-strategi yang dikemukakan secara teoritis khususnya melalui sebuah sistem pemda melalui beberapa aspek seperti keadaan sosial di desa Cibungur, lalu keadaan ekonomi, budaya, politik dan keamanan atau ketertiban, Sebagian telah teraplikasikan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa aspek yang belum ter-terapkan dengan baik dikarenakan beberapa faktor diluar kendali, seperti keadaan ekonomi di desa tersebut belum adanya sebuah program untuk membangun perekonomian yang lebih baik bagi desa tersebut, dikarenakan masih sedikit sekali warga yang menjalankan usaha. Dalam hal ini pemda setempat belum membuat Langkah yang baik untuk memperbaiki keadaan menuju perekonomian yang lebih baik. Selanjutnya aspek ketertiban yang masih belum memenuhi standar desa yang tertib dikarenakan beberapa hal, seperti jadwal piket dan siskamling yang belum bisa tepat waktu bahkan banyak yang tidak memenuhi kewajibannya, lalu di dalam hal penerapan protokol Kesehatan untuk pencegahan COVID-19 yang banyak belum patuh, ditambah warga yang membandel tetap melakukan aktivitas diluar rumah selagi isolasi mandiri.

Disamping aspek-aspek tersebut yang belum dikatakan cukup untuk di implementasikan di lingkungan desa, kehidupan sosial disana justru sebaliknya karena banyak program-program yang dicanangkan pemda berjalan dengan baik, Masyarakat Desa Cibungur pun mengakui secara positif adanya program-program tersebut, dan dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwasannya pemerintah Desa Cibungur telah berusaha dalam menciptakan strategi-strategi yang dapat meningkatkan kehidupan sosial masyarakat Desa Cibungur. Kehidupan budaya warga setempat juga cukup berjalan semestinya, dengan hadir

program gotong royong yang membangkitkan semangat warga untuk Bersama-sama membersihkan desa yang lebih baik. Masalah politik dan keamanan juga berjalan dengan baik, disaat musim politik tiba terlihat sekali semua warga sangat antusias untk terlibat dan keamanan yang terjamin dikarenakan hadirnya sistem keamanan keliling yang membuat tingkat kenyamanan para warga meningkat. Untuk calon peneliti selanjutnya, diharapkan penelaitian ini dapat dijadikan referensi sekaligus perbandingan demi tercapainya penelitian yang lebih lengkap, dan untuk para perangkat desa di Cibungur diharapkan penelitian ini dijadikan evaluasi yang cukup untuk membenahi kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan apa yang telah berhasil di canangkan di desa ini.

REFERENSI

- Ali Hasan, (2010).Marketing Bank Syariah, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Anggara, S. (2018). Ekologi Administrasi. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Ciamis: <https://jurnal.unigal.ac.id>.
- Engkus, E. (2017). Administrasi Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(1), 91-101.
- Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk), (4), 1-16.
- Farisy, S. A. (2020). Implementasi Perbup Mojokerto Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Unim, 1.
- Indiahono, D. (2009). Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Maksudi, B. I. (2017). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Depok: Rajawali Pers.
- Putra, B. S. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Melayu Kota Tanjung Pinang. Jurnal Umrah, 11.
- Rachmat. (2014). Manajemen Strategik. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Semet, A. (2016). Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan: Studi Di Desa Toka Kecamatan Bulik Timur kabupaten Lamandau. Jurnal UPR, 3.